



Interactive Governance dalam Program Kampung Iklim di Kota Bengkulu

Fitra Aini Ramadhani^{1*}, Heru Nurasa², Sawitri Budi Utami³

^{1,2,3} Universitas Padjadjaran, Indonesia

 fitriainiramadhani@gmail.com*

Abstract

Climate change is a growing and multidimensional problem that impacts all aspects of human life. The Indonesian government is responding to this through various initiatives, one of which is the Climate Village Program (ProKlim), a national program aimed at encouraging community and other stakeholder participation. This study aims to explore how the principles of interactive governance influence the Climate Village Program (ProKlim) in Bengkulu City. Data were collected through in-depth interviews with informants, participant observation, and examination of program documents. Thematic analysis was conducted using source triangulation to ensure validity. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the implementation of the Climate Village Program in Bengkulu City has been running quite optimally. Several work programs have been carried out to implement a number of adaptation actions, including flood and landslide control, food security through local agriculture, and climate-related disease control. Meanwhile, the work program that develops independent climate change mitigation includes community-based waste management (Waste Bank), environmental greening, and energy efficiency. In addition to successfully reducing the dangers associated with the impacts of climate change, this program also involves the community in sustainable and environmentally friendly conservation efforts.

Keywords: Interactive Governance, Proklm, Climate Change,

ARTICLE INFO

Article history:

Received
September 23,
2025
Revised
November 22,
2025
Accepted
December 30,
2025

Published by
ISSN

CV. Creative Tugu Pena
2774-7077

Website

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2025 by the authors

INTRODUCTION

Perubahan iklim merupakan kondisi berubahnya suhu temperatur dan distribusi curah air hujan yang membawa dampak secara luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia (Mtsweni et al., 2020). Efek nyata dari perubahan iklim, seperti peningkatan suhu global, perubahan curah hujan, dan peningkatan kejadian bencana yang disebabkan oleh alam tengah dialami banyak wilayah, termasuk Indonesia (Susanti, 2022). Perubahan iklim dapat menimbulkan resiko besar bagi kesehatan manusia, keamanan pangan, dan pembangunan ekonomi serta menimbulkan dampak yang kompleks dan mencakup banyak sector (Ainurrohmah & Sudarti, 2022). Perubahan iklim memiliki dampak yang berbeda di setiap daerah, karena adanya perbedaan posisi geografis dan kondisi keikliman di suatu daerah pada skala lokal. Secara umum, perubahan iklim hanya akan berdampak kepada alam dan lingkungan. Meskipun, kondisi cuaca yang tidak bisa diprediksi dan berubah-ubah secara drastic setiap hari juga dapat mempengaruhi kondisi non fisik dan fisik manusia (Susilawati, 2021). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menegaskan bahwa perubahan iklim merupakan salah satu ancaman terbesar bagi keberlanjutan kehidupan manusia karena berdampak luas terhadap sektor sosial, ekonomi, kesehatan, dan ekologi (IPCC, 2022; Suci, 2020; WHO, 2023).

Tren kejadian bencana hidrometeorologis dan ekologis terus meningkat dalam satu dekade terakhir. Misalnya, pada tahun 2025, total kejadian bencana mencapai 6.794 kali dengan estimasi

kerugian sekitar Rp3.6 triliun (BNPB, 2025). Selain itu, kenaikan permukaan air laut menjadi ancaman besar. Menurut estimasi, pada tahun 2100 diperkirakan ada 115 pulau Indonesia yang terancam tenggelam akibat kenaikan muka air laut (Laksono & Alexander, 2021). Bahkan, terdapat 311 kabupaten/kota, 1.643 kecamatan, dan 6.367 desa/kelurahan di wilayah pesisir Indonesia yang kemungkinan akan terdampak oleh perubahan iklim (Bappenas, 2025). Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki pengetahuan, kesadaran, serta kapasitas adaptif untuk merespons dampak perubahan iklim secara efektif (Istomo & Eliya Farida, 2017). Upaya penanggulangan perubahan iklim tidak hanya memerlukan kebijakan di tingkat nasional dan internasional, tetapi juga implementasi konkret di tingkat lokal berbasis partisipasi masyarakat. Dampak perubahan iklim sendiri di proyeksikan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menjadikan usaha pengurangan angka kemiskinan menjadi lebih sulit (Furqan, 2020). Perubahan iklim termasuk ke dalam salah satu tantangan global yang memerlukan perhatian serius dari semua lapisan masyarakat. Permasalahan ini tidak dapat selesai dengan sendirinya tanpa adanya upaya yang dilakukan oleh manusia (Luthfia et al., 2019).

Mengingat dampak dari perubahan iklim ini sangat kompleks yang mencakup kedalam banyak sektor, maka penyelesaian masalah yang dihadapi juga harus dilakukan secara terpadu dari berbagai sector sehingga adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat disinergikan dalam sistem pembangunan nasional. Sesuai dengan pendekatan lain, perspektif *interactive governance* dimulai dari asumsi bahwa masyarakat diatur oleh kombinasi upaya pemerintahan (Kooiman, 2003). *Interactive governance* atau pemerintahan yang interaktif merupakan salah satu tipe dari konsep *governance* yang menitik beratkan kepada keterlibatan aktor-aktor lain di luar pemerintah yang memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang sedang terjadi dan memiliki kapabilitas untuk menemukan solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut (Said et al., 2025). Salah satu bentuk pemerintahan yang interaktif yaitu pemerintahan yang berjejaring, yang mana dalam perspektif *networks*, struktur relasi antar organisasi bersifat lentur dan tidak terikat secara permanen dalam proses kerjasama sehingga hubungan tersebut diikat atas dasar kepercayaan (Edelenbos, J., & van Meerkerk, I. Eds, 2016). Campuran pemerintahan ini adalah 'jawaban' terhadap keragaman, dinamika, dan kompleksitas masyarakat yang terus berkembang, serta respons terhadap masalah sosial utama seperti kemiskinan dan perubahan iklim.

Pendekatan *interactive governance* berbeda dari yang lain dengan fokus pada penerapan dan kemunculannya pada berbagai skala masyarakat, dari tingkat lokal hingga global dan dengan otoritas serta tanggung jawab yang saling tumpang tindih dan lintas sektoral. *Interactive governance* adalah sebuah konsep untuk mengatur masyarakat dengan definisi yang menjelaskan apa yang diatur dan bagaimana caranya (Ansell & Torfing, 2016; Torfing, Peters, Pierre, & Sorensen, 2012, hlm. 2-3): "proses kompleks di mana sejumlah aktor sosial dan politik dengan kepentingan yang berbeda berinteraksi untuk merumuskan, mempromosikan, dan mencapai tujuan bersama melalui mobilisasi, pertukaran, dan penerapan berbagai ide, aturan, dan sumber daya". Pendekatan ini menyadari bahwa di era modern, masalah sosial-ekonomi terlalu kompleks, dinamis, dan beragam untuk diselesaikan oleh pemerintah sendirian. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi aktif. *Interactive governance* menggeser paradigma dari "Governing" (pemerintah mengatur masyarakat) menjadi "Governance" (pemerintah mengelola interaksi bersama masyarakat). Bentuk *Interactive Governance* dimaknai sebagai proses yang kompleks dimana beragam actor / stakeholder dengan kepentingan berbeda saling berinteraksi untuk merumuskan, mempromosikan, dan mencapai tujuan bersama dengan cara memobilisasi, bertukar, dan menyebarkan berbagai ide, aturan, dan sumber daya (Torfing dkk dalam Apriyani, 2022).

Interactive governance mencakup tiga aspek, yaitu sistem pemerintahan sebagai subjek, sistem yang akan diperintah sebagai objek, dan aspek terakhir adalah interaksi (Kooiman 2003; Kooiman dkk. 2008). Untuk proses pelaksanaannya, jenis tata kelola ini disebut sebagai aspek *governabilitas*, yang secara singkat dapat didefinisikan sebagai "governance capacity". Hal ini dapat ditunjukkan oleh "overall quality" dari sistem [Kooiman dkk. 2008]. Tata kelola interaktif memiliki tiga urutan panduan untuk pelaksanaan: manajemen sehari-hari sebagai urutan pertama, kemudian perancangan dan pemeliharaan institusi sebagai urutan kedua, Yang terakhir adalah *meta-governance* sebagai urutan ketiga yang menginspirasi dua urutan pertama (Kooiman 2003; Kooiman dkk. 2008). Konsep utama dalam *interactive governance* dapat di definisikan sebagai: 'Keseluruhan interaksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah masyarakat dan menciptakan peluang untuk masyarakat; termasuk perumusan dan penerapan prinsip-prinsip yang membimbing interaksi tersebut serta perhatian terhadap lembaga-lembaga yang memungkinkan dan

mengendalikannya' (Kooiman et al. 2005, hlm. 17). Di sini, peran pemerintah berubah dari seorang "pengendali tunggal" menjadi seorang fasilitator dan mediator yang menjembatani berbagai kepentingan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Fragmentasi dari pemerintah ini berarti berkurangnya kontrol pemerintah dalam pengambilan keputusan dan implementasi. Ini dikarenakan pemerintah berinteraksi dengan aktor-aktor lain yaitu sektor publik (public sector), sektor private (private sector), dan masyarakat (civil society) yang bertujuan untuk pertukaran sumber daya dalam memberikan pelayanan publik (Martinez & Laia, 2011). Ketiga komponen tersebut mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat, dan dengan keseimbangan tersebut maka akan terwujudnya keterlibatan aktor non pemerintah dalam tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan kemampuan actor. Interactive governance atau pemerintahan yang interaktif merupakan salah satu tipe dari konsep governance yang menitik beratkan kepada keterlibatan aktor-aktor lain di luar pemerintah yang memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang sedang terjadi dan memiliki kapabilitas untuk menemukan solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. ProKlim merupakan kegiatan kolaborasi antara upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada tingkat dasar dengan melibatkan peran masyarakat secara aktif serta dari berbagai pihak pendukung seperti pemerintah daerah dan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi serta lembaga non-pemerintah (DirjenPPI, 2017).

Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan sebuah program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan penguatan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilakukan untuk menaikkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. Pengalaman menunjukkan bahwa banyak strategi adaptasi dapat memberikan manfaat baik dalam penyelesaian jangka pendek dan maupun jangka panjang, namun masih ada keterbatasan dalam implementasi dan keefektifannya. Mengelola perubahan iklim melibatkan tindakan yang terencana dan spontan untuk mengurangi potensi kerugian dari ancaman, kerentanan, dampak, serta risiko yang dapat diakibatkan oleh perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat di daerah terdampak. Partisipasi aktif masyarakat menjadi salah satu indikator penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan proklim, tanpa adanya campur tangan masyarakat maka ProKlim tidak dapat terlaksana dengan baik (Rekavianti, 2019). Menurut Murdiyarto (2001), adaptasi terhadap perubahan iklim adalah salah satu cara penyesuaian yang dilakukan secara spontan maupun terencana untuk memberikan reaksi terhadap perubahan iklim.

ProKlim dilaksanakan di wilayah administrative paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa (KLHK, 2017). Dalam konteks kebijakan rendah karbon, ProKlim mendorong penerapan berbagai praktik ramah lingkungan, seperti pemanfaatan energi terbarukan, pelestarian hutan dan ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah dan limbah, pengaturan mobilitas masyarakat, serta pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan (Setyowati, 2020). Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat membentuk low carbon society, yaitu masyarakat yang secara kolektif berupaya menekan emisi karbon dari aktivitas sehari-hari maupun melalui kegiatan ekonomi (Alviya et al., 2018). Program ini memiliki landasan regulasi di level nasional yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 yang kemudian pada Tahun 2016 dirubah menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2016 karena integrasi antara kementerian lingkungan hidup dan kementerian kehutanan (Sumaryatiningsih & Nugraha, 2025). Peraturan ini mengatur tentang ruang lingkup kegiatan proklim (Albar et al., 2017).

Dalam pelaksanaannya, terdapat sektor prioritas seperti pendekatan infrastruktur, teknologi, peningkatan kapasitas, serta tata kelola dan pendanaan yang menjadi pertimbangan. Isu perubahan iklim sendiri menuntut respons lokal yang adaptif dan kolaboratif. Indonesia sendiri sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai sepanjang 54.720 km, (Yusuf dan Francisco, 2009) termasuk ke dalam kategori rentan terhadap risiko dampak akibat perubahan iklim. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia meluncurkan Program Kampung Iklim (ProKlim) untuk memfasilitasi aksi mitigasi-adaptasi berbasis komunitas. Namun, efektivitas implementasi program kerap bervariasi antar wilayah. Seperti halnya Pemerintah di Provinsi Bengkulu yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi untuk mengadopsi strategi adaptasi proklim karena didasari oleh urgensi geografis, sosial, dan target pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Sebagai kota yang berada di pesisir barat Pulau Sumatera,

Bengkulu menghadapi tantangan lingkungan yang nyata. Contohnya kenaikan permukaan air laut yang memicu abrasi pantai dan banjir rob di wilayah pesisir serta perubahan cuaca ekstrem yang memicu risiko banjir di area pemukiman padat dan tanah longsor di beberapa titik topografi curam.

Grafik 1. Nilai Indeks risiko Provinsi Bengkulu



Bengkulu termasuk kedalam salah satu Provinsi dengan resiko bencana dengan indeks yang tinggi yaitu pada nilai 144.08. Namun, disisi lain juga dapat terlihat bahwa setiap tahunnya dari tahun 2015-2024 terjadi penurunan nilai indeks resiko secara bertahap. Pada tahun 2015 nilai indeks resiko bencana mencapai dengan nilai 172.32 lebih tinggi dari nilai indeks resiko pada tahun 2024 yaitu 144.08. Masalah utama muncul ketika isu perubahan iklim menjadi terlalu kompleks, berubah dengan cepat hingga menyentuh berbagai lapisan masyarakat yang beragam. Mengacu pada kerangka kerja Ansell dan Gash (2008), kolaborasi yang sukses membutuhkan keseimbangan kekuatan dan insentif bagi semua pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam membuat keputusan.

Kegiatan penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berbasis lokal telah dilakukan di 5 desa dengan metode Focus Group Discussion (FGD). FGD ini dilakukan tujuannya untuk menyusun dokumen rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berdasarkan rencana aksi yang telah disepakati yang berkaitan dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Kelima desa tersebut memiliki kerentanan yang beragam terkait perubahan iklim dan sebagian besar terjadi di beberapa desa yang sama. Kerentanan berkaitan adaptasi, terdapat bencana iklim diantaranya kekeringan pada saat musim kemarau yang mengakibatkan debit mata air dan sungai mengecil sedangkan untuk lokasi dipesisir air sumur mengalami intursi air laut sehingga kebutuhan akan air untuk rumah tangga berkurang. Untuk lahan pertanian mengalami kekurangan air baik untuk desa yang berada di dataran tinggi dikarenakan kondisi wilayah yang berbukit yang mengandalkan air bersih dari mata air dan PAM SIMAS pun belum terlayani, kejadian banjir yang diakibatkan curah hujan tinggi sehingga terjadi genangan-genangan air di pekarangan rumah, banjir juga mengakibatkan adanya kiriman sampah yang menumpuk di jembatan desa. Sedangkan untuk kejadian penyakit terkait iklim pernah terjadi beberapa kasus warga terjangkit Demam Berdarah Dengue (DBD) akibat dari perubahan pola musim yang tidak menentu sehingga timbulnya bibit penyakit yang disebabkan oleh vektor nyamuk.

Selanjutnya menjangring informasi terkait potensi kerentanan mitigasi yang ada di lima desa tersebut, seperti permasalahan sampah yang tidak ada bak sampah desa, kesadaran masyarakat yang masih rendah, dan tidak adanya saran dan prasarana yang mendukung untuk pengelolaan sampah. Berkaitan dengan energi terbarukan, minimnya penggunaan energi terbarukan terutama untuk areal perkebunan. Di sektor pertanian, sebgain besar masyarakat menggunakan bahan pestisida pada pertanian dan pengelolaan pupuk. Selain itu, kerentanaan terhadap kebakaran hutan dan lahan yang dimitigasi dengan adanya kelompok MPA seperti di Desa Karang Jaya. Informasi mengenai kerentanan ini kemudian disusun menjadi dokumen rencana aksi yang terdiri dari kegiatan (aksi), tujuan/hasil, indikator, tahapan kegiatan, kebutuhan, mitra kerja (para pihak), penanggung jawab, dan waktu. Mengenai kerentanan permasalahan sampah dilakukan diskusi yang lebih mendalam. Karena ini menjadi bagian aksi mitigasi yang disepakatinya sebelumnya berkaitan dengan “Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga”.

Kegiatan ini melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Bengkulu, dimulai dengan Direktur Utama BPD LH dan Dirjen PPI, kemudian perwakilan BPD LH, DLHK, dan KKI Warsi, untuk memberikan memberikan gambaran yang jelas tentang program ini kepada

seluruh pihak terkait. Program ini tidak hanya berfokus pada masalah lingkungan, tetapi juga menitik beratkan pada tata kelola yang melibatkan partisipasi, transparansi, dan inklusivitas. Salah satu faktor penting untuk keberhasilan pembangunan yaitu adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Jika pembangunan melibatkan peran serta masyarakat maka pembangunan tersebut akan lebih efektif, karena masyarakatlah yang memahami kondisi, potensi permasalahan dan kapasitas lokal maka dengan demikian kebutuhan dan kepentingan lokal akan lebih dapat teridentifikasi dan terakomodasi (Indrawijaya, Adam Ibrahim, dkk, 2011). Berdasarkan landasan diatas Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana dinamika interactive governance dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) di Provinsi Bengkulu.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-interpretatif untuk memahami dinamika interactive governance dalam Program Kampung Iklim (proklim) di Kota Bengkulu. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam tentang proses koordinasi, distribusi peran, hubungan antar aktor, serta hambatan dan peluang kolaborasi lintas sektor dalam mengimplementasi program. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposif dari unsur-unsur pemerintah daerah, pelaksanaan program, dan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya yang terlibat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan observasi lapangan dan dokumentasi untuk memperkuat temuan empiris. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, peraturan, laporan program, dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi secara berkelanjutan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan akuntabel. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan pengecekan silang informasi antar dokumen, sehingga temuan penelitian lebih kredibel dan selaras dengan konteks lapangan.

RESULT AND DISCUSSION

Berdasarkan data hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti mengidentifikasi dan mengelompokkan data dengan pola makna yang berulang. Dari data mentah kemudian diringkas menjadi pemulaan awal yang dapat mencerminkan pengalaman, perspektif, dan praktik para actor yang terlibat di dalam program kampung iklim. Melalui proses ini, peneliti tidak hanya mengidentifikasi apa yang dinyatakan oleh informan, tetapi juga menafsirkan makna di balik pernyataan mereka, khususnya yang berkaitan dengan kondisi awal kolaborasi, desain kelembagaan, serta kepemimpinan fasilitatif.

Bentuk Interactive Governance Dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kota Bengkulu

Konsep seperti tata kelola interaktif memberikan prinsip atau dimensi panduan untuk memfasilitasi keterlibatan pemangku kepentingan demi tujuan tata kelola yang "baik" (Ingram, 2011; Schulz, Martin-Ortega, Glenk, & Ioris, 2017), tetapi juga memberikan manfaat seperti dukungan di antara para pemangku kepentingan untuk menghindari tindakan hukum terhadap implementasi (Edelenbos & Klijn, 2006; Irvin & Stansbury, 2004; Kooiman, 1993). Interactive governance, menurut Kooiman dkk. (2008), mencakup aktivitas sistem pemerintahan, sistem yang akan diatur, dan interaksi tata kelola. Dengan demikian, konsep ini mempertimbangkan aktor-aktor yang terlibat, struktur, proses, hubungan, dan interaksi dalam sistem yang kompleks dan beragam. Dengan kata lain, tata kelola interaktif melibatkan beberapa pihak yang memiliki kepentingan berbeda tetapi berinteraksi dan berpartisipasi dalam merumuskan, mempromosikan, dan mencapai tujuan bersama melalui mobilisasi, pertukaran, dan penyebaran berbagai ide, aturan, dan sumber daya (Torfing dkk., 2012).

Konsep ini mempertimbangkan keterlibatan para stakeholder, struktur, proses, hubungan, dan interaksi dalam suatu sistem yang kompleks (Torfing dalam Maula & Prasoj, 2021). Seperti Pemerintah Bengkulu yang merumuskan interactive governance dengan melalui penguatan kelembagaan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu No. 2 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjadi dasar hukum tingkat provinsi dalam pengelolaan lingkungan di Bengkulu, termasuk implementasi proklim serta Kebijakan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Bengkulu tentang Kampung Iklim. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas LHK Provinsi Bengkulu, bersama dengan KKI Warsi (yang ditunjuk langsung oleh Gubernur saat itu sebagai lembaga perantara) selanjutnya menyusun concept note yang kemudian disetujui oleh tim teknis KLHK dan BPD LH pada Juni 2024

melalui surat Nomor: S.189/PPI/MPI/PPI.2.2/B/6/2024. Dan penyusunan funding proposal yang disetujui oleh BPD LH pada September 2024 melalui surat Nomor: KEP123/BPD LH/2024.

Berdasarkan kutipan wawancara yang peneliti lakukan bersama Bapak safnizar selaku kepala dinas LHK, "Pendekatan yang digunakan dalam proklam ini bersifat kolaboratif, yaitu dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), komunitas lokal, serta lembaga mitra lainnya". Dalam pelaksanaan program kampung iklim tidak terlepas dari pentingnya koordinasi yang baik antara Dinas LHK, UPT KPH, dan KKI Warsi dalam peningkatan kapasitas bagi pemangku kepentingan lokal, penguatan kebijakan, dan implementasi tata kelola hutan berkelanjutan yang berbasis pada partisipasi aktif masyarakat di Bengkulu. Keterlibatan pemerintah dalam program ini tidak hanya menyukseskan program yang dijalankan tetapi juga dapat membantu pemeliharaan desa atau kampung tersebut, dengan adanya program ini sangat menguntungkan bagi masyarakat sekitar dan juga lingkungannya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan koordinasi kelembagaan berjalan efektif, dengan membangun mekanisme komunikasi dan sinergi yang berkelanjutan (Agrawal, Nepstad, & Chhatre, 2011).

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim, dijelaskan bahwa manfaat pelaksanaan Program Kampung Iklim meliputi:

1. Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan variabilitas iklim.
2. Meningkatkan sosial ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.
3. Terukurnya kontribusi dan potensi pengurangan emisi GRK pada suatu lokasi sehingga tercapaian target penurunan emisi GRK nasional.
4. Tersedianya data kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta potensi pengembangannya di tingkat desa serta dapat menjadi masukan dalam merumuskan strategi, kebijakan, dan program terkait perubahan iklim.
5. Terbangunnya kesadaran masyarakat tentang gaya hidup rendah emisi.
6. Meningkatkan kemampuan masyarakat di tingkat desa untuk memanfaatkan teknologi rendah emisi (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, 2017).

Berdasarkan kutipan wawancara yang peneliti lakukan bersama perwakilan dari Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) beliau menjelaskan "pentingnya memiliki keselarasan antara kebijakan nasional dengan implementasi di tingkat provinsi, yang sangat mendukung upaya pengurangan emisi karbon dan perlindungan hutan untuk pencapaian target perubahan iklim secara global". Untuk memitigasi hal tersebut oleh karena itu sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program, kegiatan ini telah dirancang dengan mengundang berbagai aktor kunci dari tingkat nasional, provinsi, hingga komunitas lokal. Setiap peserta kegiatan juga diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, pertanyaan, atau kekhawatiran mereka terkait program. Pendekatan ini dilakukan dengan bertujuan untuk memastikan keterwakilan dan partisipasi aktif semua pihak / kelompok yang terdampak.

Program kampung iklim ini memiliki mekanisme penyaluran dana yang dikelola oleh BPD LH melalui dua skema: pertama, secara langsung kepada penerima manfaat yang akan mengelola dana, dan kedua, secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara (LEMTARA). Dimana penyaluran dana dilakukan melalui skema kedua, dengan KKI Warsi sebagai LEMTARA yang berkontrak langsung dengan BPD LH untuk mengelola dan menyalurkan dana kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu. Selain itu, di dalam kegiatan ini juga memperkenalkan berbagai peluang pendanaan lain yang tersedia untuk masyarakat, seperti dana Terra CF atau FOLU Norway's contribution, yang menawarkan akses langsung bagi masyarakat atau kelompok dalam mendanai proyek-proyek konservasi dan pengurangan emisi karbon. Dana ini membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Sejalan dengan program proklam ini yang melibatkan masyarakat dan stakeholder terkait dalam proses komunikasi, penyediaan sumber daya, disposisi informasi, dan struktur birokrasi untuk mengarahkan pada praktik ramah lingkungan (Setiadi, 2023).

Program Kampung Iklim atau yang di sebut proklam adalah program pemerintah dalam rangka mendorong masyarakat untuk melakukan peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat desa/kelurahan terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan penghargaan terhadap upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilaksanakan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. Pelaksanaan proklam dilakukan di

wilayah lokasi yang telah diusulkan dan telah memenuhi syarat dari Tim ProKlim Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kegiatan identifikasi lokasi dan penjangkauan informasi untuk pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat masyarakat sebagai bagian dari implementasi Program Kampung Iklim (Proklim) telah dilaksanakan melalui serial diskusi partisipatif di lima desa. Diskusi ini bertujuan membangun pemahaman masyarakat tentang konsep dasar Proklim, penyebab serta dampak perubahan iklim yang dirasakan langsung, dan langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi atau mengantisipasi dampak tersebut.

Secara umum berdasarkan form isian proklim dan tinjauan lapangan yang dilakukan oleh Bidang 2 DLHK, diketahui bahwa kelima desa tersebut telah melaksanakan sejumlah aksi adaptasi, antara lain seperti pengendalian banjir dan longsor, ketahanan pangan melalui pertanian lokal, serta pengendalian penyakit terkait iklim. Pelaksanaan proklim mengedepankan aspek keberlanjutan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak. Masyarakat didorong untuk dapat terlibat dalam setiap tahap pengambilan keputusan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan pada lokasi kampung iklim. Melalui pendekatan ini komitmen dan motivasi masyarakat akan meningkat, serta memperkuat rasa kepemilikan terhadap program / kegiatan yang berjalan. Diskusi teknis juga telah dilaksanakan untuk memastikan adanya keselarasan antara program dengan target yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi potensi kendala dan strategi solusi. Pengendalian risiko limbah dalam setiap kegiatan menjadi perhatian utama dengan penerapan prinsip *reduce, reuse, recycle*, termasuk meminimalkan penggunaan plastik dan memastikan fasilitas pengelolaan sampah tersedia. Para mitra pelaksana juga diberikan pengarahan untuk mengoptimalkan keterlibatan masyarakat seperti pemerintah desa, tokoh adat, pemuda, dan kelompok melalui proses pra-kondisi sebelum kegiatan dilaksanakan.

Identifikasi lokasi pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim) dilakukan di 5 desa yaitu Desa Marga Sakti (Kabupaten Bengkulu Utara), Desa Pekik Nyaring (Kabupaten Bengkulu Tengah), Desa Kali Padang dan Desa Karang Jaya (Kabupaten Rejang Lebong), serta Desa Batu Ampar (Kabupaten Kepahiang). Kegiatan ini mencakup serial diskusi membangun hubungan dengan komunitas setempat untuk memperoleh partisipasi aktif dan mengidentifikasi kebutuhan spesifik desa dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim, pemilihan lokasi kegiatan identifikasi didasarkan pada hasil formulir isian Proklim yang mencatat aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilaksanakan oleh masyarakat pada periode 2018–2020. Sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan, lokasi yang dipilih merupakan zona penyangga dari Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba, Hutan Lindung Bukit Daun, dan Taman Hutan Raya (Tahura) Raja Lelo. Lokasi ini juga berfungsi sebagai pusat aktivitas masyarakat, meliputi pasar, ekowisata, pertanian, dan pesisir pantai, sehingga menjadi prioritas dalam pelaksanaan Proklim guna memastikan pengelolaan ekosistem yang optimal.

Berdasarkan kutipan wawancara yang peneliti lakukan bersama Direktur KKI Warsi, Adi Junedi, yang mengatakan "kegiatan identifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep dasar Proklim, penyebab, dan dampak perubahan iklim yang dirasakan secara langsung. Selanjutnya, dalam tahap prakondisi, perangkat desa dan pemangku kepentingan bersama-sama secara partisipatif menentukan keterlibatan perwakilan masyarakat yang telah atau berpotensi melakukan aksi adaptasi dan mitigasi di tingkat desa secara inklusif serta identifikasi dilakukan melalui proses membangun kesepahaman dan persetujuan bersama dengan masyarakat". Diketahui bahwa kelima desa telah melaksanakan sejumlah aksi adaptasi, antara lain pengendalian banjir dan longsor, ketahanan pangan melalui pertanian lokal, serta pengendalian penyakit terkait iklim. Namun, efektivitas kegiatan tersebut masih perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Meskipun telah ada berbagai inisiatif adaptasi tersebut, hasil diskusi dan analisis menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan serius dalam pengelolaan sampah, baik sampah organik maupun anorganik. Isu pengelolaan sampah ini menjadi kendala umum yang dihadapi oleh seluruh desa dan berpotensi menghambat efektivitas aksi adaptasi jika tidak ditangani secara sistematis.

Melalui diskusi dan refleksi bersama masyarakat, disepakati bahwa penguatan aksi pengendalian sampah akan menjadi prioritas utama dalam implementasi Program Proklim di lima desa tersebut. Aksi yang disepakati meliputi pengelolaan sampah organik menjadi kompos sebagai alternatif pupuk untuk mendukung ketahanan pangan lokal, serta pemanfaatan sampah anorganik menjadi produk bernilai tambah, seperti tas belanja, kerajinan tangan, dan barang daur ulang

lainnya. Kesepakatan ini menjadi langkah penting untuk mendorong integrasi kegiatan adaptasi-mitigasi berbasis masyarakat secara lebih nyata dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kapasitas desa dalam menghadapi dampak perubahan iklim melalui pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Pengelolaan sampah yang tidak efektif dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berdampak negatif pada kesehatan masyarakat (Faedlulloh, Irawan, and Prasetyanti 2019). Oleh karena itu, kegiatan pelatihan pengelolaan sampah berbasis rumah tangga di lima desa lokasi Program Kampung Iklim (ProKlim) ini dirancang sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menerapkan praktik ramah lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan desa terhadap dampak perubahan iklim. Tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan teknis, kegiatan ini juga diarahkan untuk membangun kesadaran kolektif, memperkuat kelembagaan lokal, dan menciptakan peluang ekonomi berbasis lingkungan.

Kegiatan yang terkait dengan upaya adaptasi perubahan iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim dan dampak yang di timbulkannya dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan sumber daya yang dimiliki dan karakteristik masing-masing desa. Kegiatan yang berkaitan dengan upaya mitigasi perubahan iklim sesungguhnya telah banyak dilaksanakan pada lokasi-lokasi yang memiliki kearifan lokal yang tinggi. Kegiatan mitigasi perubahan iklim merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca. Setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat, program dilanjutkan dengan pengadaan sarana dan prasarana pendukung sebagai langkah implementasi di tingkat tapak. Penyediaan sarana ini menjadi tahapan penting untuk memastikan bahwa pengetahuan yang telah diperoleh melalui pelatihan dapat langsung diterapkan oleh masyarakat dalam praktik sehari-hari. Disinilah kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan stakeholder lainnya menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program ini (Izza et al. 2024).

Untuk memastikan pemanfaatan sarana tersebut berjalan sesuai dengan rencana, dilakukan kegiatan monitoring di masing-masing desa. Monitoring ini bertujuan untuk menilai perkembangan implementasi, mengidentifikasi kendala yang dihadapi masyarakat, serta menggali kebutuhan perbaikan baik dari aspek teknis maupun kelembagaan. Kegiatan monitoring dilaksanakan selama satu hari di setiap desa dengan melibatkan perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat penerima manfaat. Metode yang digunakan adalah diskusi kelompok terarah (FGD) yang diikuti oleh perwakilan instansi terkait dan masyarakat. Melalui proklm, masyarakat dan pemerintah setempat berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan berkelanjutan ke dalam aktivitas sehari-hari. Program ini juga menjadi sarana edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan menjaga kelestarian lingkungan. Manfaat yang paling besar yang akan dirasakan masyarakat dalam melakukan upaya adaptasi dan mitigasi yaitu, pengurangan bencana, peningkatan kualitas lingkungan, dan yang terakhir adalah meningkatkan pendapatan masyarakat (Rifyanti 2018).

Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu

Selain melihat dari sudut pandang Interactive governance juga perlu diingat bahwa perubahan iklim terjadi karena aktivitas manusia atau masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa laju perubahan iklim saat ini lebih dominan dipicu oleh aktivitas manusia seperti deforestasi, pembakaran bahan bakar fosil, emisi dari sector transportasi dan industri, serta pengelolaan limbah yang tidak berkelanjutan (IPCC 2022; Rosadi et al., 2022). Bahkan, aktivitas rumah tangga sehari-hari, termasuk konsumsi energi listrik dan penggunaan bahan bakar untuk memasak, turut berkontribusi terhadap peningkatan emisi karbon di atmosfer. Oleh karena itu, upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim menjadi sangat penting untuk dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, khususnya di tingkat komunitas yang merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan lingkungan. Meningkatkan partisipasi masyarakat sangat penting agar pembangunan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan lebih efisien dalam pemanfaatan sumber daya yang ada (Hasanah et al., 2024).

Proklm bertujuan membangun kesadaran, kapasitas, dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan melalui berbagai kegiatan seperti pengelolaan sampah, penghijauan, konservasi air, pengurangan emisi gas rumah kaca dan lain sebagainya (Farid & Cadith, n.d.). Prinsip utama pelaksanaan ProKlim adalah memberdayakan masyarakat secara aktif, dengan pendekatan berbasis komunitas, sumber daya lokal, dan keberlanjutan. Masyarakat

tidak hanya sebagai penerima manfaat, melainkan juga sebagai pelaku dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Secara sederhana Goulet, menyebut partisipasi sebagai suatu cara melakukan interaksi antar dua kelompok. Kelompok yang selama ini tidak di ikut sertakan dalam proses pengambilan keputusan (non-elite) dan kelompok yang selama ini di ikut sertakan dalam proses pengambilan keputusan (elite). Untuk mencapai keberhasilan dalam upaya ini dibutuhkan kerja sama yang baik antar masyarakat dan pemerintahan setempat (Tirta et al., 2022).

Partisipasi aktif masyarakat menjadi salah satu indikator penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan proklamasi tanpa adanya campur tangan masyarakat maka proklamasi tidak dapat terlaksana dengan baik. Melalui *interactive governance* pemerintah menyadari bahwa regulasi top-down saja tidak cukup untuk menjaga lingkungan. Banyak masalah lingkungan di Provinsi Bengkulu berakar dari aktivitas sehari-hari yang belum ramah lingkungan (misalnya pembakaran sampah, pembuangan limbah sembarangan, dan kurangnya area resapan air). Masyarakat diedukasi untuk melakukan mitigasi mandiri, seperti pengelolaan sampah berbasis komunitas (Bank Sampah), penghijauan lingkungan, dan efisiensi penggunaan energi. Beberapa komponen aksi yang akan dilakukan berkaitan dengan pengelolaan sampah di lima 5 desa ProKlim ini, diantaranya:

1. Sosialisasi pengelolaan sampah ramah tungga
2. Pelatihan pengelolaan sampah organik dan anorganik
3. Pembentukan kelompok pengelola sampah
4. Pemilihan sampah rumah di sumbernya (rumah tangga)
5. Pengelolaan sampah organik
6. Pengelolaan sampah anorganik
7. Pengurangan sampah
8. Mendorong kebijakan pengelolaan sampah melalui peraturan desa

Masyarakat di Desa memahami tujuan penyusunan Rencana aksi adaptasi mitigasi perubahan iklim dalam upaya meminimalisir dampak perubahan iklim. Jika pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan baik, beberapa kerentanan bisa dapat diminimalisir.

Melalui metode partisipatif, masyarakat diajak mengenali jenis-jenis sampah rumah tangga yang bersifat organik, seperti sisa nasi, sayur, ampas kopi, maupun kulit buah. Peserta kemudian diperkenalkan pada media ember komposter sebagai teknologi sederhana yang mampu mengubah sampah dapur menjadi produk bermanfaat. Proses pengomposan dijelaskan secara rinci, mulai dari penggunaan buah-buahan sebagai starter yang berfungsi memancing pertumbuhan bakteri baik dan/atau pemanfaatan lalat Black Soldier Fly (BSF) yang akan menghasilkan maggot sebagai pengurai alami. Melalui proses ini, peserta memperoleh pemahaman bahwa sampah organik tidak hanya dapat dikurangi volumenya, tetapi juga mampu menghasilkan dua produk utama: pupuk organik cair (POC) yang dapat dipanen setelah satu bulan, serta kompos padat yang bermanfaat untuk tanaman pangan maupun tanaman hias. Kemudian beralih pada pengelolaan sampah anorganik. Masyarakat diperkenalkan dengan berbagai jenis sampah seperti plastik, kaca, dan logam, serta metode memilah dan membersihkannya. Pendekatan kreatif diperkenalkan dengan mengubah sampah anorganik menjadi produk kerajinan yang memiliki nilai tambah. Peserta dilibatkan dalam praktik langsung membuat berbagai produk inovasi kerajinan sederhana seperti tas belanja dari bungkus kopi atau mie instan, keranjang buah, vas bunga, pouch, hingga tempat tisu.

Dengan adanya keterampilan ini, diharapkan masyarakat tidak hanya mampu mengurangi sampah anorganik, tetapi juga dapat membuat produk daur ulang yang ramah lingkungan untuk menunjang kebutuhan peralatan hidup dalam kesehariannya. Lebih jauh, bahkan juga dapat berpeluang untuk dijadikan usaha kreatif yang dapat menambah penghasilan rumah tangga. Selain pelatihan teknis, kegiatan ini juga berorientasi pada penguatan kelembagaan masyarakat. Di setiap desa dibentuk kelompok pengelola bank sampah yang dikukuhkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa. Kelompok ini menjadi motor penggerak pengelolaan sampah secara kolektif, mulai dari pendistribusian bantuan sarana hingga pengorganisasian kegiatan secara berkelanjutan. Setiap kelompok ditargetkan menghasilkan minimal satu produk kerajinan dari sampah anorganik, yang sekaligus menjadi bukti nyata bahwa sampah dapat bernilai guna apabila dikelola dengan tepat. Proses ini diharapkan menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap kegiatan, sekaligus membangun motivasi untuk terus berinovasi. Penting untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan agar mereka merasa menjadi bagian dari proses tersebut dan lebih berkomitmen dalam menjaga hasil pembangunan (Hakim, 2018). Tidak hanya itu, peserta juga diperkenalkan

pada pembuatan eco-enzyme dari kulit buah. Produk ini memiliki manfaat ganda, baik sebagai pembersih alami pengganti sabun rumah tangga maupun sebagai ramuan herbal sederhana untuk menjaga kesehatan.

Materi ini menambah wawasan masyarakat bahwa limbah organik, sekecil apapun, tetap memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara bijak. Pelatihan ini menjadi ruang pembelajaran kolektif yang menyatukan pengetahuan praktis, teknologi sederhana, serta semangat kebersamaan. Dengan adanya komitmen peserta untuk melanjutkan dan menularkan hasil pelatihan, kegiatan ini mampu menumbuhkan gerakan perubahan di tingkat rumah tangga dan desa, yang berkontribusi nyata pada pengurangan timbunan sampah sekaligus penguatan ketahanan lingkungan menghadapi perubahan iklim. Pada pelaksanaan kegiatan program Kampung Iklim (Proklim), meskipun tantangan terkait partisipasi perempuan dan pemuda serta ketidakseimbangan representasi peserta muncul, kesadaran masyarakat terhadap aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim semakin meningkat. Melalui diskusi dan refleksi bersama masyarakat, disepakati bahwa penguatan aksi pengendalian sampah akan menjadi prioritas utama dalam implementasi Program Proklim di lima desa tersebut. Aksi yang disepakati meliputi pengelolaan sampah organik menjadi kompos sebagai alternatif pupuk untuk mendukung ketahanan pangan lokal, serta pemanfaatan sampah anorganik menjadi produk bernilai tambah, seperti tas belanja, kerajinan tangan, dan barang daur ulang lainnya.

Table 1. Jumlah Partisipant Proklim

Penerima Manfaat dan / atau participant	Partisipasi			Persentase	
	Perempuan	Laki-Laki	JMLH	Perempuan	Laki-Laki
Periode Quartal 1 (Jan - Mar 2025)					
Identifikasi Lokasi: Menentukan lokasi untuk implementasi program Proklim berdasarkan kriteria strategis. Serta Serial diskusi untuk membangun hubungan dengan komunitas setempat untuk memperoleh partisipasi aktif dan Identifikasi kebutuhan	53	63	116	46%	54%
Periode Quartal 2 (Apr - Jun 2025)					
Penyusunan Rencana Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim tingkat tapak berbasis Masyarakat	70	78	148	47%	53%
Periode Quartal 3 (Jul - Sep 2025)					
Pelatihan dan Kapasitasi: Pelatihan Bagi Anggota Komunitas Tentang Praktik Ramah Lingkungan Dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Penyediaan Peralatan Penunjang Implementasi PROKLIM	75	69	144	52%	48%

Sumber: Diolah melalui data Laporan KKI - Warsi

Kegiatan Program proklim ini berhasil melibatkan total 148 peserta dari 5 desa tersebut, dengan 70 orang di antaranya adalah perempuan (47%). Kehadiran dan partisipasi yang relatif aktif dari perempuan juga menjadi satu indikator penting dari terciptanya ruang yang setara dalam diskusi publik. Isu-isu yang diangkat oleh perempuan, seperti pengelolaan air bersih dan pengelolaan sampah berbasis rumah tangga, memperkaya perspektif dalam perumusan rencana aksi. Hal ini menunjukkan adanya pemberdayaan perempuan secara substantif, tidak hanya simbolik, dalam kegiatan. Seperti halnya dalam observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, berdasarkan hasil monitoring terlihat adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan limbah padat melalui pemanfaatan hasil pengolahan sampah organik juga telah mulai terlihat, dimana sebagian masyarakat telah memproduksi pupuk organik cair (POC) dan mengaplikasikannya pada tanaman seperti cabai, terong, dan pepaya. Selain itu, inisiatif lain yang berkembang adalah pembuatan eco-enzyme dari limbah buah yang difermentasi, yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian dan pemeliharaan tanaman. Dari aspek inovasi, masyarakat juga mulai mengembangkan pembuatan aktivator kompos (EM4) secara mandiri

menggunakan bahan sederhana, yang berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas proses pengolahan sampah organik.

Hal ini menunjukkan adanya potensi kemandirian dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang perlu terus diperkuat. Melalui pelatihan yang diberikan, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola sumber daya dan menciptakan peluang usaha baru. Dengan demikian, proklamasi tidak hanya berkontribusi pada pengelolaan lingkungan, tetapi juga pada peningkatan ekonomi masyarakat (Khoerunnisa 2022). Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan hasil analisa yang diperoleh dari penelitian ini bahwa Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk beradaptasi dalam menghadapi pemanasan global. Masyarakat juga telah menjalankan kegiatan Proklamasi secara terus menerus dalam hal pengelolaan gas rumah kaca sehingga tingkat pengetahuan masyarakat mengenai Proklamasi terutama pengelolaan sampah berada dalam kategori sangat baik. Secara umum, kegiatan monitoring menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan sampah rumah tangga telah berjalan dan mulai memberikan hasil, namun masih memerlukan penguatan lebih lanjut. Aspek yang perlu ditingkatkan meliputi kapasitas teknis masyarakat, konsistensi dalam praktik pengelolaan, serta penguatan kelembagaan kelompok agar pemanfaatan sarana dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

CONCLUSION

Pada tingkat tapak, masyarakat di 5 desa sasaran Proklamasi telah mulai mengimplementasikan praktik pengelolaan sampah rumah tangga sesuai hasil pelatihan, yang ditunjukkan melalui pemanfaatan ember komposter untuk sampah organik dan mesin jahit untuk pengolahan sampah anorganik. Selain itu, telah teridentifikasi kebutuhan peralatan pendukung untuk pengembangan usaha KUPS di wilayah KPHL Bukit Daun, sebagai dasar penguatan ekonomi kelompok berbasis potensi lokal. Penelitian ini menunjukkan bahwa adaptasi dan mitigasi diwujudkan melalui perilaku hidup bersih dan sehat, penyediaan ruang terbuka hijau, pelestarian mangrove, efisiensi energi rumah tangga, serta pengelolaan sampah dan limbah domestik. Proses ini tidak hanya menghasilkan dokumen perencanaan teknis, tetapi juga menjadi sarana edukatif dan transformatif bagi masyarakat dalam memahami dan menginternalisasi agenda iklim ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Diskusi-diskusi terbuka, pemetaan tantangan dan peluang lokal, hingga formulasi strategi yang relevan telah memperkuat kepemilikan kolektif terhadap aksi iklim di tingkat tapak. Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan serangkaian pelatihan berbasis rencana aksi, khususnya pelatihan praktik pengelolaan sampah rumah tangga (organik dan anorganik). Komunitas ditargetkan mampu menerapkan praktik-praktik ramah lingkungan secara mandiri dan berkelanjutan. Pasca pelatihan, implementasi di lima desa akan dipantau untuk memastikan aksi nyata dapat berjalan secara optimal. Meskipun kontribusi mitigasi masih berskala lokal akan tetapi akumulasi praktik tersebut menunjukkan potensi dalam membentuk low carbon society. Implikasi kebijakan dari penelitian ini menegaskan perlunya integrasi peningkatan literasi iklim ke dalam desain Program Kampung Iklim (proklamasi) melalui edukasi yang berkelanjutan, penguatan kelembagaan desa, dan dukungan kebijakan lintas sektor agar keberlanjutan program dapat terjamin.

REFERENCES

- Agrawal, A., Nepstad, D., & Chhatre, A. (2011). Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation. *Annual Review of Environment and Resources*, 36(1), 373–396.
- Ainurrohmah, S., & Sudarti. (2022). Analisis Perubahan Iklim dan Global Warming yang Terjadi sebagai Fase Kritis. *Jurnal Pendidikan Fisika Dan Fisika Terapan*, 8, No. 1.
- Alviya, I., Muttaqin, M. Z., Salminah, M., & Hamdani, F. A. U. (2018). Upaya Penurunan Emisi Karbon Berbasis Masyarakat di Hutan Berfungsi Lindung. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 15 No.1, 19–3. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20886/jakk.2018.15.1.19-37>
- Albar, I. et al. (2017) Road Map Program Kampung Iklim (ProKlim), 2017. Available at: https://procurement-notice.undp.org/view_file.cfm?doc_id=318921.
- Ansell, C., & Torfing, J. (2016). *Handbook on theories of governance*. Northampton: Edward Elgar Publishing.
- Apriyani, R. S. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2018-2020. Universitas Mercu Buana Yogyakarta

- BNPB. Data Informasi Bencana Indonesia. <https://www.dibi.bnpb.go.id>.
- Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. (2017). PerDirjenPPI No. P1.PPI/SET/KUM.I/2/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim.
- DirjenPPI. (2017). Road Map Program Kampung Iklim (ProKlim).
- Edelenbos, J., & Klijn, E. H. (2006). Managing stakeholder involvement in decision making: A comparative analysis of six interactive processes on the Netherlands. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16, 417–446.
- Edelenbos, J., & van Meerkerk, I. (Eds.). (2016). *Critical reflections on Interactive governance: Selforganization and participation in public governance*. Edward Elgar Publishing.
- Faedlulloh, Dodi, Bambang Irawan, and Retnayu Prasetyanti. 2019. "Program Unggulan Kampung Iklim (ProKlim) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat". *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*4 (1): 28–44. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v4i1.2364>.
- Farid, M. M., & Cadith, J. (n.d.). Evaluasi Program Kampung Iklim sebagai Upaya Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan di Kampung Airport Kecamatan Teluk naga Kabupaten Tangerang. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2, No. 4.
- Furqan, M. H., Azis, D., Wahyuni, R., Jurusan, D., Geografi, P., Usk, F., & Jurusan, M. (2020). Implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) Di Gampong Lambung Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. *Jurnal Pendidikan Geosfe*, 5(2), 42–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jpg.v5i2.21691>
- Hakim, L. (2018, November). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2 (2).
- Hasanah, R. L., Mulyady, S., Azahra, S., Nuraeni, S., & Ridwan. (2024). Peran Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pembuatan Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 5 (8).
- Indrawidjaja, A. I., Pranoto, J., Riduwan, Sukari, & Subandi. (2011). *Revitalisasi administrasi pembangunan: berbasis jatidiri dan karakter bangsa dalam pembangunan nasional*. Alfabeta.
- Ingram, H. (2011). Beyond universal remedies for good water governance: A political and contextual approach. In A. Garrido & H. Ingram (Eds.), *Water for food in a changing world* (pp. 241–261). Abingdon, England/New York, NY: Routledge
- IPCC. (2022). *Climate Change 2022 – Impacts, Adaptation and Vulnerability*. In *Climate Change 2022 – Impacts, Adaptation and Vulnerability*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009325844>
- Irvin, R. A., & Stansbury, J. (2004). Citizen participation in decision making: Is it worth the effort? *Public Administration Review*, 64(1), 55–65.
- Istomo, & Eliya Farida, N. (2017). Potensi simpanan karbon di atas permukaan tanah tegakan acacia nilotica l. (willd) ex. Del. Di taman nasional baluran, Jawa Timur. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 7(2), 155–162. <https://doi.org/10.19081/jpsl.2017.7.2.155>
- Izza, Jasmine Nurul, Dinar Arsy Anggarani, Alby Aruna, and Hendra Susanto. 2024. "Mewujudkan Industri Tempe Malang Ramah Lingkungan Melalui Pemanfaatan Limbah Produksi Sebagai Pupuk." *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*4 (4): 505–13. <http://penerbitgoodwood.com/index.php/jpm/article/view/2657>.
- Khoerunnisa, Wahda. 2022. "Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Ubi Jalar Improving the Community's Economy Through the Utilization of Sweet Potatoes" 2 (3): 261–68. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v2i3.6332>.
- KLHK Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim. (2017). *Roadmap program kampung iklim (ProKlim)*. Jakarta: Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Kooiman, J. (Ed.). (1993). *Modern governance: New governmentsociety interactions*. London: Sage.
- Kooiman, J. (2003): *Governing as governance*. London: Sage
- Kooiman, J., M. Bavinck, S. Jentoft and R. Pullin (eds.) (2005): *Fish for life*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Kooiman, J., Bavinck, M., Chuenpagdee, R., Mahon, R., & Pullin, R. (2008). Interactive Governance and Governability. *Journal of Transdisciplinary Environmental Studies*, 7(1), 29–50. <https://doi.org/10.4337/9781783479078>

- Laksono, M. Y., & Alexander, H. B. (2021, September 17). BRIN Prediksi 115 Pulau Akan Hilang pada Tahun 2100. <https://www.kompas.com/properti/read/2021/09/17/100000221/brin-prediksi-115-pulau-akan-hilang-pada-tahun-2100>.
- Luthfia, A. R., Alimin, N. N., Nugraheni, F. S. A., & Alkhajar, E. N. S. (2019). Penguatan Literasi Perubahan Iklim Di Kalangan Remaja. *Jurnal Abadimas Adi Buana*, 3, No. 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.36456/abadimas.v3.i1.a1941>
- Martinez, Laia. 2011. "Governance Networks as Collaborative platforms for Innovation in the Public Sector. *Network Governance: Theories, Methods, and practice*. RUC October 2011 hal. 1-13.
- Maula, A., & Prasajo, E. (2021). Interactive Governance of Regulatory Reform in the Issuing of Building Construction Permits in DKI Jakarta. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 25(1), 55–73.
- Murdiyarto, Daniel., CDM., 2014, Sepuluh Tahun Perjalanan Negosiasi Konvensi Perubahan Iklim, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- Mtsweni, N., Combrink, H. M., & Marivate, V. (2020). Mapping the South African health landscape in response to COVID19. *arXiv preprint arXiv:2006.15216*.
- Rekavianti, E. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kelurahan Cepoko Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.
- Rifyanti, Rike. (2018). Evaluasi Program Kampung Iklim Dalam Mengurangi Risiko Dampak Perubahan Iklim Desa Nglegi, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul. UGM.
- Rosadi, D., Saily, R., Zaiyar, Z., & Jusi, U. (2022). Identifikasi jejak karbon skala rumah tangga sebagai upaya mengatasi perubahan iklim. *Indonesian journal of construction engineering and sustainable development (CESD)*, 5(2), 15–23. <https://doi.org/10.25105/cesd.v5i2.15629>
- RPJMN 2025–2029. Jakarta: Bappenas, 2025.
- Said, A., Zainal, N. H., & Afrisal, A. F. (2025). Interactive Governance Dalam Program Kampung Iklim Di Kota Makassar. *Journal of Public Service, Public Police, and Administration*, 4, No. 2.
- Schulz, C., Martin-Ortega, J., Glenk, K., & Ioris, A. A. R. (2017). The value base of water governance: A multi-disciplinary perspective. *Ecological Economics*, 131, 241–249.
- Setiadi, Z. W. (2023) 'Pemberdayaan masyarakat melalui "Program ProKlim" dengan memanfaatkan sumber daya lokal di Desa Kawengen', *Panrannuangku Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(4), pp. 117–125
- Setyowati, A. B. (2020). Governing the ungovernable: Contesting and reworking REDD+ in Indonesia. *Journal of Political Ecology*, 27(1), 456–475.
- Suci, I. (2020). Analisis Implementasi Program Kampung Iklim Untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Di Korong Pasa. *JKPL: Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan*, 1(1).
- Sumaryatiningsih, S., & Nugraha, Y. K. (2025). Kepemimpinan Kolaboratif dan Partisipasi Substantif Kunci Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Iklim Padukuhan Joho. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 2 No.1.
- Susanti, A. A. (2022). Implementasi dan Pengembangan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Desa Kertonatan. *Buletin KKN Pendidikan Vol. 4 No.1*, 68-60.
- Susilawati, S. (2021). Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kesehatan. *Electronic Journal Scientific of Environmental Health And Disease*, 2(1), 25–31. <https://doi.org/10.22437/esehad.v2i1.13749>
- Tirta, D. I., Latief, R., & Tato, S. (2022). Hubungan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Limbah Domestik IPAL Losari Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar. *Urban and Regional Studies Journal*, 5(1), 4–8.
- Torfig, J., Peters, B. G., Pierre, J., & Sorensen, E. (2012). *Interactive governance: Advancing the paradigm*. New York: Oxford University Press.
- WHO. (2023, October 12). Climate change. <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/climate-change-and-health>.
- Yusuf, A.A. & Francisco, H., 2009. Climate change vulnerability mapping for southeast asia. *Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA)*, Singapore. http://web.idrc.ca/uploads/user-S/12324196651Mapping_Report.pdf.